BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 087 / HM.00.02/K.SB-08/03/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PODCAST

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparasi dan penyebaran informasi dalam tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dan efektifitas penyelenggaraan podcast, perlu dibentuk Tim Kerja Podcast Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno yang tertuang dalam berita acara nomor : 040 /KA.02/SB-08/2/2022 yang mengamanatkan membentuk tim kerja podcast;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Kelompok Kerja Podcast Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Scanned with CamScanner

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Scanned with CamScanner

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA PODCAST BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERTAMA : Menetapkan Tim Kerja Podcast Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja Podcast sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab secara administrasi kepada Koordinator Sekretariat secara fungsional kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rapat Pleno;

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 7 Maret 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERMAN WADISON

PARAF KOORDINASI		
ejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
ordiv Hukum		7/3/22
ordiv		7/3/22
oordinator Sekretariat		7/3/22
.....		7/3/22

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Scanned with CamScanner

MPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : /HM.00.02/K.SB-08/03/2022
TANGGAL : 7 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA PODCAST BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ERMAN WADISON, S.Hum	KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMBINA
2	ARIESKI ELFANDI, MA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMBINA
3	NURMAIDI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMBINA
4	SYAFRIJAL CHAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMBINA
5	YANI RAHMASARI, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
6	RINALDI, S.Pd., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	KOORDINATOR
7	FUAD EL KHAIR, S.KOM., M.KOM	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS PELAKSANA
8	ROLAN AKBAR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS PELAKSANA
9	SYAFRIZAL, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS PELAKSANA
10	NAIMUL QISMAN, S.Hum	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS PELAKSANA
11	ICHWAN FADLY, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS PELAKSANA
11	FAUZAN ADI PUTRA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS PELAKSANA
12	NILU SANDIKA PUTRI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS PELAKSANA

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 7 Maret 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERMAN WADISON

Scanned with CamScanner